



PUTUSAN

Nomor 648/Pdt.G/2017/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YNG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

NAMA PEMOHON, umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjual Gorengan, Pendidikan Sekolah Dasar, Tempat Kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, Sebagai Pemohon.

Melawan

NAMA TERMOHON, umur 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Penjual Gorengan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Tempat Kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan perkara Nomor 648/Pdt.G/2017/PA Msb., Dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari senin tanggal 28 September 2009, yang di catat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 320/17/IX/2009, tanggal 30 September 2009.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan dan setelah itu Pemohon dan Termohon
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di

Hlm 1 dari 15 hlm Put. No.
648/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa selama 1 bulan, dan setelah itu Pemohon dan Termohon pindah kerumah kontrakan di Makassar selama 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon kembali kerumah orang tua Pemohon di Desa, Kecamatan selama 4 bulan lalu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa Kecamatan selama 2 tahun 8 bulan dan setelah itu Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Desa Sidoraharjo, Kecamatan selama 7 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada bulan September 2011 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- > Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sehingga tidak mensyukuri apa yang diberikan Pemohon seperti uang.
- > Termohon sering mengeluarkan perkataan yang tidak pantas didengar oleh Pemohon.

5. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon masih bisa bersabar menunggu Termohon berubah sifat dan sikap Termohon namun Termohon tidak bisa berubah, dan kalau dinasihati Termohon malah marah dan mengeluarkan perkataan yang tidak pantas hingga tidak peduli nasihat Pemohon sehingga perselisihan terus menerus terjadi.

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2017, disebabkan persoalan yang sama sehingga Pemohon pergi kerumah orang tua Pemohon di Desa, Kec. karena Pemohon tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Termohon atas sikapnya tersebut.

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang 9 bulan lamanya tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri namun Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon

8. Bahwa Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Hlm 2 dari 15 hlm Put No. 648/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 648/Pdt.G/2017/PA Msb. masing-masing tanggal 29 November 2017 dan 6 Desember 2017 yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha memberi nasihat kepada Pemohon selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor 320/17/IX/2009 tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,
Kabupaten Luwu Utara yang bermeterai cukup dan telah cocok dengan
aslinya (bukti

P);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga
menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I : umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman
di Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu
Utara, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon
harmonis dan telah dikaruniai seorang anak dan sekarang tidak harmonis
lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah
tangga Pemohon dengan Termohon namun saksi sering melihat Pemohon
dengan Termohon bertengkar sewaktu tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar
sembilan bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak
saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Termohon tidak berupaya merukunkan
Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi II : umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat
kediaman di Desa, Kecamatan,
Kabupaten Luwu Utara, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah kemanakan Pemohon;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon
harmonis dan telah **dikaruniai seorang anak**;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak harmonis namun saksi

Hlm 4 dari 15 hlm Put. No. 648/Pdt.G/2017/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tahu penyebabnya hanya pernah mendengar mereka bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar sembilan bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm 5 dari 15 hlm Put. No. 648/Pdt.G/2017/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan** Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo; Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Masamba telah melakukan panggilan secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

V ^Ua

^jj.iiJ 4ll

(ji

(jc.j

<1 (ija.

Artinya :

Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
“barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap
di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka
ia termasuk **orang yang dhalim dan gugurlah haknya**”.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan
rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon
dan Termohon harmonis namun sejak bulan September 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm 6 dari 15 hlm PuL No. 648/Pdt.G/2017/PA.Msb.mulai muncul perselisihan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan Termohon sering mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P), bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang

Hlm 1 dari 15 hlm Put No. 648/Pdt.G/2017/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demis seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini berlangsung 9 bulan lamanya;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya;

Hhn 2 dari 15 hlm Put. No.
648/Pdt,G/2017/PA.Msb.



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dalam **waktu cukup lama dan tidak saling mempedulikan lagi** maka patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dalam waktu lama tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran; Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan

Hlm 3 dari 15 hlm Put. No. 648/Pdt.G/2017/PA.Msb.



berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri **menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;**

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Hlm 4 dari 15 hlm Put. No. 648/Pdt.G/2017/PA.Msb.



▢ **Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi hingga berpisah sampai sekarang, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*!

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;

Hlm 5 dari 15 hlm Put. No. 648/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Pemohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat ^ ^ (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm 6 dari 15 hlm Put. No. 648/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang
perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-
Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

﴿وَإِذَا طَلَّقَ الْمَرءُ نِسَاءً فَإِنْ تَحَدَّثَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِمَا فِي شَيْءٍ مِمَّا سَفَّهْتُمَا بَيْنَكُمَا ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمَا أَن يَتَمَتَّعَا بِهِمَا وَلَا يَفْتِنَا ۚ وَمَن يَفْتَئِدْ يَفْتِنِ النَّفْسَ الَّتِي حَفَّتْ ۖ وَالْعَفْوُ أَكْبَرُ ۚ﴾

Artinya : 'Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka
sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui'

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum
nomor 1 dapat dikabulkan *dengan* verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan
maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirim
salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada PPN yang mewilayahi
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN di tempat
pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu, sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan
ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada
Pemohon;

Hlm 7 dari 15 hlm Put. No. 648/Pdt.G/2017/PA.Msb.



1. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Abdul Hizam Monoarfa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Jamaluddin S, S.El sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mahdys Syam, S.H

Dr

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Hakim Anggota II,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H

Hlm 8 dari 15 hlm Put. No. 648/Pdt.G/2017/PA.Msb.



Panitera Pengganti,

Jamaluddin S,S.E.I

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 360.000,00
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
5. Biaya Redaksi	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm 9 dari 15 hlm Put. No. 648/Pdt.G/2017/PA.Msb.